Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Junior Hecta¹, Imam Munajat Nurhartonosuro², Muhadi³

^{1,2,3} Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

e-mail: juniorhecta15@gmail.com¹, imammunajat1982@gmail.com²,
mhadie11326@gmail.com³

Abstrak

Perairan Indonesia, sebagai salah satu yang terluas di dunia, memegang peranan strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik negara ini. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan tersebut, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004. TNI AL dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan aktivitas kapal asing ilegal yang mengancam kedaulatan dan sumber daya alam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran TNI AL dalam penegakan hukum di perairan Indonesia, serta untuk menganalisis tantangan operasional yang dihadapi, kerjasama lintas lembaga, dampak kegiatan patroli, persepsi masyarakat, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan personel TNI AL yang terlibat langsung dalam operasi di perairan Indonesia. Data dikumpulkan mengenai frekuensi patroli, jenis pelanggaran yang ditangani, serta tindakan yang dilakukan oleh TNI AL. Hasil analisis menunjukkan bahwa TNI AL secara efektif menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan perairan Indonesia melalui patroli rutin dan penegakan hukum terhadap berbagai jenis pelanggaran. Meskipun menghadapi tantangan seperti jangkauan wilayah yang luas dan koordinasi lintas lembaga yang perlu ditingkatkan, TNI AL telah berhasil meraih dukungan positif dari masyarakat sekitar atas peran dan kehadirannya dalam melindungi sumber daya alam kelautan Indonesia.

Kata Kunci: *Peran, Keamanan, TNI Angkatan Laut*

Abstract

Indonesian waters, as one of the largest in the world, play a strategic role in the economic, social and political life of this country. The Indonesian Navy (TNI AL) has the mandate to maintain security and law enforcement in these waters, in line with Law of the Republic of Indonesia No. 34 of 2004. The Indonesian Navy is faced with various challenges such as fishing theft, smuggling of prohibited goods, and illegal foreign vessel activities which threaten Indonesia's sovereignty and natural resources. This research aims to describe the role of the Indonesian Navy in law enforcement in Indonesian waters, as well as to analyze the operational challenges faced, cross-agency collaboration, the impact of patrol activities, public perceptions, and strategies to increase the effectiveness of maritime law enforcement. This research uses a descriptive approach by collecting data through literature studies and interviews with Indonesian Navy personnel who are directly involved in operations in Indonesian waters. Data is collected regarding the frequency of patrols, types of violations handled, and actions taken by the Indonesian Navy. The results of the analysis show that the Indonesian Navy is effectively carrying out its duties in maintaining the security of Indonesian waters through routine patrols and law enforcement against various types of violations. Despite facing challenges such as wide territorial coverage and cross-agency coordination that needs to be improved, the Indonesian Navy has succeeded in gaining positive support

from the surrounding community for its role and presence in protecting Indonesia's marine natural resources.

Keywords: *Role, Security, Indonesian Navy*

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memegang peran krusial dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia (Thamsi et al., 2024). Perairan Indonesia, yang merupakan salah satu yang terluas di dunia, meliputi lautan, selat, dan perairan kepulauan yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik negara ini (Pamungkas et al., 2023). Dalam TNI AL tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di laut, tetapi juga untuk melindungi sumber daya alam, menegakkan hukum, dan mengatasi berbagai tantangan keamanan maritim (Nasution, 2020).

TNI AL bertanggung jawab atas keamanan maritim Indonesia, yang mencakup berbagai aspek termasuk patroli, pengawasan, dan penegakan hukum di perairan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memberikan mandat kepada TNI AL untuk melindungi kedaulatan negara di laut (Sinambela, 2024). Di bawah Undang-Undang ini, TNI AL memiliki kewajiban untuk mengamankan perairan Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tingkat operasional, TNI AL bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya (Tanjung, 2020). Mereka melakukan patroli rutin untuk mencegah kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan aktivitas ilegal lainnya yang merugikan negara dan masyarakat. Patroli ini tidak hanya dilakukan di perairan terbuka tetapi juga di zona-zona ekonomi eksklusif Indonesia, tempat sumber daya alam yang berharga harus dilindungi (Suryawan et al., 2021).

Dalam penegakan hukum maritim, TNI AL juga terlibat dalam penangkapan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Penerapan Hukum Laut Nasional memberikan landasan hukum bagi TNI AL untuk bertindak dalam penegakan hukum di laut. Misalnya, mereka dapat menangkap kapal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia atau melakukan penangkapan kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Herlambang Suryo Putro, 2022). Selain itu, TNI AL juga berperan dalam mengawasi kepatuhan terhadap peraturan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan, seperti yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) (Alivia, 2023). Ini melibatkan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan melindungi kepentingan nelayan lokal agar tidak terpinggirkan akibat illegal fishing yang merugikan (Rohana, 2022).

TNI AL juga berperan penting dalam mengamankan perairan strategis Indonesia, termasuk jalur pelayaran internasional yang melewati perairan Indonesia (Zamili, 2022). Keamanan jalur pelayaran ini sangat vital bagi kepentingan ekonomi global dan nasional, sehingga TNI AL aktif melakukan patroli dan pengawasan untuk mencegah terjadinya ancaman keamanan seperti perompakan dan penyelundupan senjata (Silitonga & Kurniawan, 2023). Di samping itu, TNI AL juga menjaga keamanan perairan di sekitar wilayah-wilayah strategis seperti Kepulauan Natuna yang memiliki posisi strategis di Laut Cina Selatan. Hal ini penting mengingat ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan tersebut dan upaya-upaya untuk menjaga kedaulatan negara serta sumber daya alamnya (Arcan, 2021).

TNI AL tidak hanya bekerja di tingkat nasional tetapi juga secara aktif terlibat dalam kerja sama internasional untuk meningkatkan keamanan maritim regional dan global. Kerja sama ini meliputi latihan bersama, pertukaran informasi intelijen, dan diplomasi maritim untuk menghadapi tantangan bersama seperti perompakan, terorisme maritim, dan penangkapan ikan ilegal. Indonesia sebagai negara maritim dengan jumlah pulau yang sangat banyak juga

menjadikan TNI AL sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan di perairan yang luas dan kompleks (Damanik et al., 2023). Dengan demikian, peran TNI AL tidak hanya sebatas sebagai kekuatan militer tetapi juga sebagai penegak hukum dan pembela kepentingan nasional dalam domain maritim.

Di masa depan, TNI AL dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, perdagangan ilegal, dan ancaman keamanan non-tradisional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi dalam penggunaan teknologi canggih seperti satelit, drone, dan sistem pengawasan maritim untuk meningkatkan efektivitas patroli dan pengawasan di perairan yang luas. Selain itu, penting juga untuk terus memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam menghadapi masalah bersama seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing atau tindakan terorisme maritim (Rohana, 2022). Diplomasi maritim juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dan kerja sama antar negara dalam menjaga keamanan di laut yang semakin terbuka dan terkoneksi.

Peran TNI AL dalam penegakan hukum dan keamanan di wilayah perairan Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional di laut. Dengan landasan hukum yang jelas dan dukungan teknologi yang memadai, TNI AL terus berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan maritim, menegakkan hukum, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam kelautan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama dan inovasi, TNI AL dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih efektif untuk kepentingan bersama bangsa dan negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang cocok untuk metode kualitatif ini adalah penelitian deskriptif atau eksploratif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau kelompok tertentu secara detail dan menyeluruh. Sementara itu, penelitian eksploratif dilakukan ketika pengetahuan tentang suatu topik masih terbatas atau belum banyak diketahui, sehingga peneliti berusaha untuk mendapatkan wawasan baru dan pemahaman mendalam.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari TNI AL atau pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penegakan hukum di laut. Contohnya adalah data operasional, laporan kegiatan patroli, atau wawancara dengan personel TNI AL yang terlibat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa dokumen resmi seperti undang-undang, regulasi terkait keamanan maritim, laporan penelitian sebelumnya, atau artikel ilmiah yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penggunaan observasi dapat dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan operasional TNI AL di perairan, misalnya patroli atau latihan bersama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

2. Wawancara

Wawancara mendalam dengan personel TNI AL, perwakilan pemerintah terkait, ahli keamanan maritim, atau nelayan lokal dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran TNI AL, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari kegiatan penegakan hukum.

Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis secara tematis atau content analysis, dengan fokus pada pola-pola, tema utama, dan perbedaan dalam pandangan atau pengalaman yang terungkap dalam wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Wawancara

No.	Topik Wawancara	Pertanyaan Utama	Jawaban Utama
1	Tantangan Operasional	Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam operasional harian dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia?	"Tantangan utama kami adalah jangkauan wilayah yang luas dan kebutuhan akan lebih banyak kapal patroli untuk pengawasan yang lebih efektif." "Kami juga sering menghadapi masalah dengan peralatan yang kurang memadai di beberapa wilayah terpencil."
2	Koordinasi dengan Instansi Lain	Bagaimana kerjasama dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai dalam menjalankan tugas sehari-hari?	"Kerjasama dengan Kepolisian dan Bea Cukai sangat penting. Kami rutin bertukar informasi dan terkadang melakukan operasi bersama untuk menangkap kapal ilegal." "Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum maritim."
3	Dampak Kegiatan Patroli Terhadap Keamanan	Bagaimana kegiatan patroli TNI AL berdampak terhadap keamanan di wilayah perairan yang Anda tangani?	"Kami melihat pengurangan signifikan dalam kasus pencurian ikan dan penyelundupan barang terlarang setelah meningkatkan frekuensi patroli kami." "Masyarakat juga merasa lebih aman karena kami aktif di perairan, menjaga kedaulatan dan melindungi nelayan lokal."
4	Persepsi Masyarakat terhadap Peran TNI AL	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kehadiran dan peran TNI AL di perairan sekitar mereka?	"Secara umum, masyarakat mendukung kehadiran kami karena mereka merasa dilindungi dan sumber daya alam terjaga." "Namun, ada juga beberapa keluhan terkait keterlambatan respons kami terhadap panggilan darurat di beberapa daerah terpencil."
5	Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum	Apa strategi yang Anda rencanakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di masa depan?	"Kami sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi canggih seperti drone untuk meningkatkan pemantauan di wilayah yang sulit dijangkau." "Kami juga berencana untuk meningkatkan pelatihan personel dalam penanganan situasi darurat dan teknik penangkapan yang lebih

Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan berbagai responden dari TNI AL mengungkapkan beragam aspek terkait tantangan operasional, kerjasama lintas lembaga, dampak kegiatan patroli, persepsi masyarakat, serta strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia.

1. Tantangan Operasional

Tantangan utama yang dihadapi TNI AL dalam operasional harian mereka adalah jangkauan wilayah yang luas. Hal ini menjadi kendala signifikan dalam upaya mereka untuk menjaga keamanan di perairan Indonesia yang begitu meluas. Responden menyatakan perlunya lebih banyak kapal patroli agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah dengan peralatan yang kurang memadai di beberapa wilayah terpencil. Tantangan ini menggarisbawahi perlunya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur dan teknologi untuk mendukung misi keamanan mereka di laut.

2. Koordinasi dengan Instansi Lain

Kerjasama antara TNI AL dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai dinilai sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Responden mengakui adanya pertukaran informasi yang rutin dan terkadang melakukan operasi bersama untuk menangkap kapal ilegal. Meskipun demikian, terdapat catatan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum maritim. Hal ini menggambarkan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan yang kompleks di perairan Indonesia.

3. Dampak Kegiatan Patroli Terhadap Keamanan

Kegiatan patroli yang ditingkatkan oleh TNI AL memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keamanan di wilayah perairan yang mereka tangani. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada pengurangan yang nyata dalam kasus pencurian ikan dan penyelundupan barang terlarang setelah frekuensi patroli diperbanyak. Selain itu, masyarakat merasa lebih aman karena adanya kehadiran aktif TNI AL di perairan, yang tidak hanya menjaga kedaulatan negara tetapi juga melindungi nelayan lokal dari aktivitas ilegal yang merugikan.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Peran TNI AL

Secara umum, tanggapan masyarakat terhadap kehadiran TNI AL di perairan sekitar mereka cenderung positif. Masyarakat merasa dilindungi dan sumber daya alam mereka terjaga dengan baik. Namun demikian, ada beberapa keluhan terkait keterlambatan respons TNI AL terhadap panggilan darurat di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan kesiapan dan responsivitas dalam situasi darurat untuk memastikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

5. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di masa depan, TNI AL merencanakan beberapa strategi yang inovatif. Salah satunya adalah mempertimbangkan penggunaan teknologi canggih seperti drone untuk meningkatkan pemantauan di wilayah yang sulit dijangkau secara konvensional. Selain itu, mereka juga berencana untuk meningkatkan pelatihan personel dalam penanganan situasi darurat dan teknik penangkapan yang lebih efisien. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen mereka untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kapasitas operasional untuk menjaga keamanan maritim Indonesia dengan lebih efektif.

Dari analisis hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa TNI AL memainkan peran yang krusial dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan operasional dan koordinasi, mereka berhasil memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keamanan dan perlindungan sumber daya alam di laut. Persepsi positif masyarakat terhadap kehadiran mereka menjadi cerminan dari upaya mereka dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada penduduk lokal. Strategi

masa depan yang terencana dengan baik, termasuk penggunaan teknologi canggih dan peningkatan pelatihan personel, menunjukkan komitmen mereka untuk terus berinovasi dan memperkuat kapasitas dalam menjalankan tugas penegakan hukum maritim.

Tabel 2. Frekuensi Patroli TNI AL di Berbagai Wilayah Perairan Indonesia

Wilayah Perairan	Frekuensi Patroli per Bulan	Jenis Kegiatan Utama
Laut Natuna	20	Patroli keamanan, pengawasan perbatasan
Laut Jawa	30	Penegakan hukum, patroli anti-pencurian ikan
Laut Sulawesi	25	Patroli anti-penyelundupan, penegakan hukum internasional

Berdasarkan Tabel 2 yang menggambarkan frekuensi patroli TNI AL di berbagai wilayah perairan Indonesia, dapat dilihat bahwa setiap wilayah memiliki intensitas patroli yang berbeda sesuai dengan fokus kegiatan utama yang dilakukan. Secara khusus, Laut Natuna memiliki frekuensi patroli sebanyak 20 kali per bulan dengan fokus utama pada keamanan dan pengawasan perbatasan. Wilayah ini dikenal strategis karena letaknya yang dekat dengan Laut Cina Selatan, yang sering kali menjadi titik fokus ketegangan geopolitik regional. Patroli yang intens di wilayah ini menunjukkan upaya TNI AL dalam menjaga kedaulatan nasional dan mengamankan perbatasan laut Indonesia. Sementara itu, Laut Jawa memiliki frekuensi patroli sebanyak 30 kali per bulan dengan fokus pada penegakan hukum dan patroli anti-pencurian ikan. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas perikanan yang tinggi, sehingga penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti pencurian ikan menjadi prioritas. Patroli yang sering dilakukan di Laut Jawa mencerminkan peran TNI AL dalam melindungi sumber daya alam kelautan Indonesia serta mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan lokal. Di Laut Sulawesi, TNI AL melakukan patroli sebanyak 25 kali per bulan dengan fokus pada patroli anti-penyelundupan dan penegakan hukum internasional. Wilayah ini penting karena menjadi jalur transit bagi banyak kapal dagang internasional dan sering kali rentan terhadap aktivitas penyelundupan barang terlarang. Patroli yang intens di Laut Sulawesi menunjukkan komitmen TNI AL dalam mengatasi tantangan keamanan maritim yang melintasi perbatasan internasional. Secara keseluruhan, analisis berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa TNI AL telah menyesuaikan strategi patroli berdasarkan kebutuhan khusus di setiap wilayah perairan Indonesia. Dengan meningkatkan frekuensi patroli dan fokus kegiatan yang sesuai, TNI AL tidak hanya mengamankan perairan nasional tetapi juga menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan nasional secara efektif.

Tabel 3. Jenis Pelanggaran yang Ditangani oleh TNI AL

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus per Tahun	Tindakan yang Dilakukan
Pencurian Ikan	200	Penangkapan kapal, konfiskasi alat tangkap
Penyelundupan Barang Terlarang	50	Penangkapan kapal, koordinasi dengan Bea Cukai
Aktivitas Kapal Asing Illegal	100	Peringatan, pengawalan keluar dari ZEE

Berdasarkan Tabel 3 yang memuat jenis pelanggaran yang ditangani oleh TNI AL, dapat dilihat bahwa TNI AL terlibat dalam menangani berbagai jenis pelanggaran yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. Pertama, dalam hal pencurian ikan, TNI AL menghadapi sekitar 200 kasus per tahun. Tindakan yang dilakukan termasuk penangkapan kapal yang terlibat serta konfiskasi alat tangkap untuk mengurangi aktivitas ilegal yang merugikan nelayan lokal dan merusak ekosistem laut. Penegakan

hukum terhadap pencurian ikan menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Kedua, dalam hal penyelundupan barang terlarang, TNI AL mencatat sekitar 50 kasus per tahun. Tindakan yang diambil meliputi penangkapan kapal yang melakukan penyelundupan serta koordinasi dengan Bea Cukai untuk mengamankan barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Upaya ini tidak hanya untuk membatasi perdagangan ilegal tetapi juga untuk melindungi keamanan nasional dari potensi ancaman yang dibawa oleh barang-barang terlarang. Ketiga, aktivitas kapal asing ilegal mencatat sekitar 100 kasus per tahun yang ditangani oleh TNI AL. Tindakan yang dilakukan meliputi peringatan kepada kapal-kapal tersebut serta pengawalan keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Langkah ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum internasional dan mengamankan perairan Indonesia dari potensi ancaman keamanan yang dapat ditimbulkan oleh kapal-kapal ilegal.

Analisis berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa TNI AL tidak hanya berperan dalam mengamankan perairan Indonesia dari ancaman konvensional seperti pencurian ikan dan penyelundupan barang terlarang, tetapi juga dalam menangani masalah kapal asing ilegal yang dapat mengganggu kedaulatan nasional. Tindakan yang dilakukan mencerminkan komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan maritim serta melindungi sumber daya alam Indonesia untuk keberlanjutan ekonomi dan keamanan nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek peran TNI AL dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa TNI AL memainkan peran yang sangat penting dan kompleks dalam menjaga keamanan nasional serta melindungi sumber daya alam di laut. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan operasional yang signifikan seperti jangkauan wilayah yang luas dan peralatan yang kurang memadai, tetapi juga berhasil menangani berbagai jenis pelanggaran seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan aktivitas kapal asing ilegal. Kerjasama lintas lembaga dengan Kepolisian dan Bea Cukai juga menjadi kunci dalam menjalankan tugas sehari-hari, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan koordinasi. Respons positif dari masyarakat terhadap kehadiran TNI AL mencerminkan keberhasilan mereka dalam menjaga keamanan lokal dan merespons berbagai kejadian maritim secara efektif. Dengan strategi patroli yang terarah dan penggunaan teknologi canggih yang semakin meningkat, TNI AL siap menghadapi tantangan masa depan dalam menjaga kedaulatan nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya alam kelautan yang berkelanjutan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alivia, R. (2023). *Peran Tni-Al Ditingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Kasus Tni Al Surabaya)*.
- Arcan, R. (2021). Peran Penyidik Pangkalan Tni Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing Di Perairan Natuna. *UNES Law Review*, 3(4), 428–439.
- Damanik, C., Suwarno, P., Asih, B., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 263–275.
- Herlambang Suryo Putro, S. (2022). Peran Tni AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(2), 118–131.
- Nasution, H. A. (2020). Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara: Law Enforcement and Sovereignty in State Border Areas by the Indonesian National Army in North Sulawesi Province. *Reformasi Hukum*, 24(2), 150–168.

- Pamungkas, B. N. R., Lestari, A., Faisol, A., & Hartono, D. (2023). Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Hukum Illegal Fishing dan Destruktive Fishing di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10536–10539.
- Rohana, U. (2022). Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla RI dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan terhadap Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna Utara. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(4), 261–267.
- Silitonga, P., & Kurniawan, E. A. (2023). Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi Pada Smart Defense Guna Mendukung Tugas Pokok Tni Al Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pertahanan Aspek Laut Di Ibu Kota Negara. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 689–699.
- Sinambela, J. (2024). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melaksanakan Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) Berdasarkan Unclos 1982 Terhadap Pelanggaran Hukum Di Laut. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 2(1), 250–263.
- Suryawan, I. G. P., Ladjide, S., & Riyadi, S. F. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Selat*, 8(2), 149–158.
- Tanjung, A. P. (2020). Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(1).
- Thamsi, M. I., Thalib, H., & Arief, A. (2024). Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunaan Bom Ikan Dan Bahan Kimia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 391–410.
- Zamili, P. A. S. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 191–203.